

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan strategi yang ada di Indonesia adalah untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan dan hasilnya melewati tujuan kebijakan pembangunan sektoral serta kinerja masyarakat terutama yang ada di desa. Pembangunan desa adalah suatu subjek pembangunan dan juga sebagai gerakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang diikuti oleh kesadaran dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk yang ada di Indonesia bertempat tinggal diperdesaan.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonom yang diberikan daerah seluruhnya untuk mengurus semua kegiatan pemerintah tidak termasuk kewenangan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan daerah yang bersangkutan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dan juga otonomi yang nyata serta bertanggung jawab. Nyata berarti bahwa dalam melaksanakan urusannya menurut kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah, sedangkan bertanggung jawab merupakan dalam penyelenggaraan otonomi harus sama dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya termasuk di lingkungan pedesaan.

Kesejahteraan masyarakat desa dalam paradigma pembangunan ekonomi dan perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan ekonomi akan mengakibatkan kesejangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Desa Banuayu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim yang dikenal memiliki berbagai potensi di dalamnya. Hal ini dikarenakan meskipun secara geografis Desa Banuayu merupakan desa terkecil di wilayah Kecamatan Rambang Dangku dengan luas wilayah sebesar 3.734 Ha, namun memiliki tingkat pembangunan dan perekonomian yang tumbuh cukup cepat jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di kecamatan yang sama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan baik dalam skala besar maupun menengah yang ada di Desa Banuayu. Hal ini tentunya akan berdampak baik bagi perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Banuayu juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proporsional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk

desa, yang bersasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Ketertarikan ini dikarenakan program ADD merupakan program yang jika dijalankan dengan baik akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kemakmuran ataupun kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai standar kehidupan seperti pembangunan, kesehatan dan pendidikan.

Namun, dalam realisasinya terdapat kendala yang selalu terjadi yaitu kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari ADD. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kontrol dari masyarakat dan pemerintah serta minimnya sumber daya yang ada. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi desa itu sendiri.

Akutanbilas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan oleh peraturan perundang undangan tentang pengelolaan Dana Desa yang harus dilaksanakan setiap kegiatan pengelolaan keuangan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksud untuk membiayai sebagian program pemerintah yang melaksanakan kegiatan yang dilakukanya salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan jalan untuk masyarakat

Tahun 2001 sebagai tahun efektif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, berarti usia kebijakan ADD telah mencapai 18 tahun. berarti sudah sekitar 18 tahun desa diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan dan

pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana dari pemerintah pusat. Di Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, pada tahun 2017 mendapatkan alokasi dana desa Rp 168.265.000 dan terjadi peningkatan pada alokasi dana desa tahun 2018 sebesar Rp 629.176.300.

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum mempunyai wewenang tersebut maupun berskala kecil dan lokal yang termasuk wilayah administrasi desa itu sendiri. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan resmi ditingkat desa tertuang dalam bentuk peraturan desa secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus, sehingga hal ini tentunya akan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa tersebut

Jika dikaitkan dengan kelembagaan desa, berdasarkan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, kelembagaan desa yaitu organisasi desa terdiri atas badan permusyawaratan desa yang dapat diartikan organisasi yang merupakan wakil dari penduduk desa atas wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa membahas dan menyepakati peraturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya peningkatan kinerja

organisasi desa memperkuat rasa kebersamaan, serta meningkatkan ikut serta masyarakat dan memperdayakan masyarakat, pemerintah Desa atau badan permusyawaratan desa dalam menyelenggarakan musyawarah desa.

Diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD yang disalurkan, kebijakan desa yang diterapkan dan adanya partisipasi dari kelembagaan desa dapat mensejahterakan masyarakat dan juga dapat meningkatkan pembangunan di perdesaan secara bersama-sama. Untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, pembangunan, keterampilan dan prakarsa dengan melalui bimbingan dan bantuan dari pemerintah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil Judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangu Kabupaten Muara Enim)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Banuayu?
2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Banuayu?

3. Apakah kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Banuayu?

### **1.3 Ruang Lingkup Permasalahan**

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dalam penulisan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Banuayu.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok pembahasan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi serta memberi perbendaharaan berupa tulisan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa

terhadap kesejahteraan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul dan topik mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah- masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan - permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin

dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi metodologi penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.